



Tersedia secara online pada

<https://jurnalpradah.blitarkab.go.id/>


Kebijakan Fiskal Dalam Pembangunan Berkelanjutan: *Panel Least Square*

Moch. Syamsudin

Badan Koordinasi Wilayah Jember, Jember, Indonesia

mochsyamsudin76@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of fiscal policy on sustainable development through Regional Original Revenue (PAD), economic growth, poverty, and greenhouse gas (GHG) variables in the Bakorwil V Jember region. The data used are panel data of regencies/cities for the period 2018–2023. The analytical method employed is Panel Least Square (PLS) with a Fixed Effect Model (FEM) approach. The results show that poverty has a negative and significant effect on PAD, while greenhouse gas (GHG) emissions have a positive and significant effect on PAD. Meanwhile, economic growth does not have a significant effect on PAD. These findings indicate that poverty and GHG influence changes in PAD, while economic growth does not significantly affect PAD. Therefore, government policies are needed to increase labor absorption and strengthen sustainable development through improvements in technology and capital to maintain economic stability and sustainability.

Keywords: Regional Original Revenue (PAD); economic growth; poverty; greenhouse gas (GHG)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan fiskal terhadap pembangunan berkelanjutan melalui variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan gas rumah kaca (GRK) pada wilayah kerja Bakorwil V Jember. Data yang digunakan merupakan data panel kabupaten/kota periode 2018–2023. Metode analisis yang digunakan adalah Panel Least Square (PLS) dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan gas rumah kaca (GRK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil ini menunjukkan bahwa kemiskinan dan GRK memberikan dampak terhadap perubahan PAD, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta penguatan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan teknologi dan modal guna menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan pembangunan.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD); pertumbuhan ekonomi; kemiskinan; gas rumah kaca (GRK)

INFORMASI ARTIKEL

Syamsudin, M. (2025). Kebijakan Fiskal Dalam Pembangunan Berkelanjutan: Panel Least Square. *Jurnal Perspektif Pembangunan Daerah*, 02 (02), 103-110.

<https://doi.org/10.66151/jurnalpradah.v2i2.23>

© The Author(s)

JURNAL PERSPEKTIF PEMBANGUNAN DAERAH

Dipublikasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Pemerintah Kabupaten Blitar, Indonesia

Alamat: Jalan Semeru No. 40, Kota Blitar – Provinsi Jawa Timur 66117

Telepon: (0342) 808165

E-mail: jurnalpradah@blitarkab.go.id

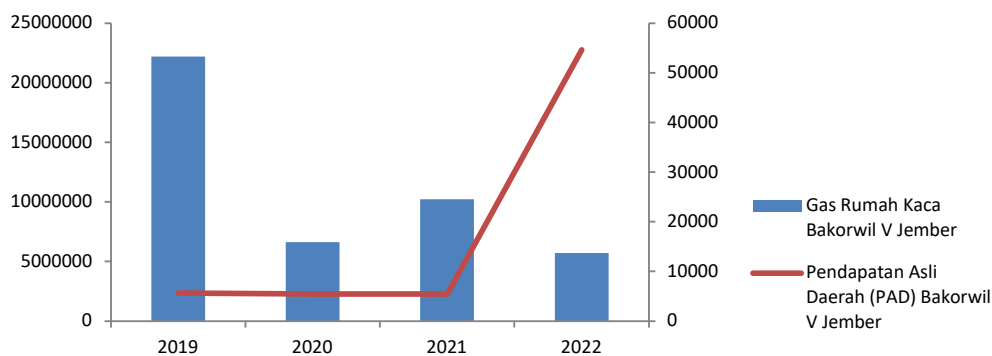
PENDAHULUAN

Ketidakpastian perekonomian dunia yang berdampak pada sektor pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun daerah, perlu adanya kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Sebagai salah satu komponen penting dalam proses pembangunan, instrumen kebijakan fiskal yakni Anggaran Penerimaan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD) yang tertera dalam peraturan Negara dan Daerah sebagai alat pemerintah dalam mendapatkan penerimaan dan pembiayaan serta stabilitas perekonomian (Abraham *et.al*, 2024). Kebijakan fiskal memainkan peran sentral dalam pengelolaan ekonomi suatu negara, terutama dalam mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan distribusi kesejahteraan. Kebijakan ini mencakup penggunaan instrumen anggaran, seperti pajak dan belanja negara, untuk memengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Meskipun kebijakan fiskal sering dipandang sebagai alat teknis ekonomi, ia juga memiliki dimensi konseptual, filosofis, dan hukum yang penting dalam pembentukannya (Adiyanta, 2020).

Secara konseptual, kebijakan fiskal berakar pada teori ekonomi yang memandu pemerintah dalam merespons berbagai tantangan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pemahaman tentang konsep ini menjadi penting untuk memahami tujuan dan mekanisme kerja kebijakan fiskal dalam mengelola siklus ekonomi serta menyeimbangkan kepentingan jangka pendek, seperti stabilitas harga, dengan kepentingan jangka panjang, seperti pembangunan berkelanjutan (Arkaan & Yulianto, 2025). Penggunaan input dan output pemerintah untuk menjangkau pembangunan industri dan stabilitas dikenal sebagai kebijakan fiskal. Salah satu alat utama yang digunakan pemerintah untuk mendorong pembangunan industri adalah kebijakan fiskal. New Keynesian menyatakan bahwa tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mendorong investasi yang optimal secara sosial dan meningkatkan laju investasi, yang keduanya dapat mendorong pembangunan industri secara keseluruhan (Hafizd *et.al*, 2024). Pendekatan ini menunjukkan bagaimana kontrol negara terhadap pendapatan dan belanja mempunyai dampak besar terhadap dinamika perekonomian dan pembangunan berkelanjutan.

Secara konseptual, kebijakan fiskal dipahami sebagai instrumen utama pemerintah dalam mengatur penerimaan (pajak, retribusi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)) serta pengeluaran publik (belanja modal, sosial, dan lingkungan) guna mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan kelestarian sumber daya (Handini *et.al*, 2025). Peningkatan pesat dalam kegiatan industrialisasi telah mendorong konsumsi bahan bakar fosil secara masif, diikuti oleh gelombang urbanisasi akibat tingginya mobilitas penduduk dari wilayah pedesaan ke kota-kota besar. Kemajuan dalam bidang teknologi, kesehatan, dan infrastruktur turut mendorong peningkatan angka harapan hidup manusia. Namun, pertumbuhan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Skala dan intensitas aktivitas produksi serta konsumsi yang terus meluas telah menimbulkan tekanan berat terhadap daya dukung lingkungan (Hidayat, 2022).

Kondisi tersebut tercermin dari PAD Provinsi Jawa Timur, terutama pada wilayah Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Jember (Bakorwil V Jember). Bakorwil V Jember yang terdiri dari 6 kabupaten, yakni Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Probolinggo, serta 1 kota yakni Kota Probolinggo. Jangkauan wilayah yang cukup luas memberikan gambaran bagaimana kondisi pembangunan dan perekonomian Provinsi Jawa Timur bagian timur. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menyatakan jumlah penduduk dan makroekonomi wilayah kerja Bakorwil V Jember sebanyak 18,86% dari total penduduk Provinsi Jawa Timur sebanyak 41,84 juta jiwa dan jumlah pertumbuhan ekonomi secara agregat sebesar 4,82% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 4,63%.



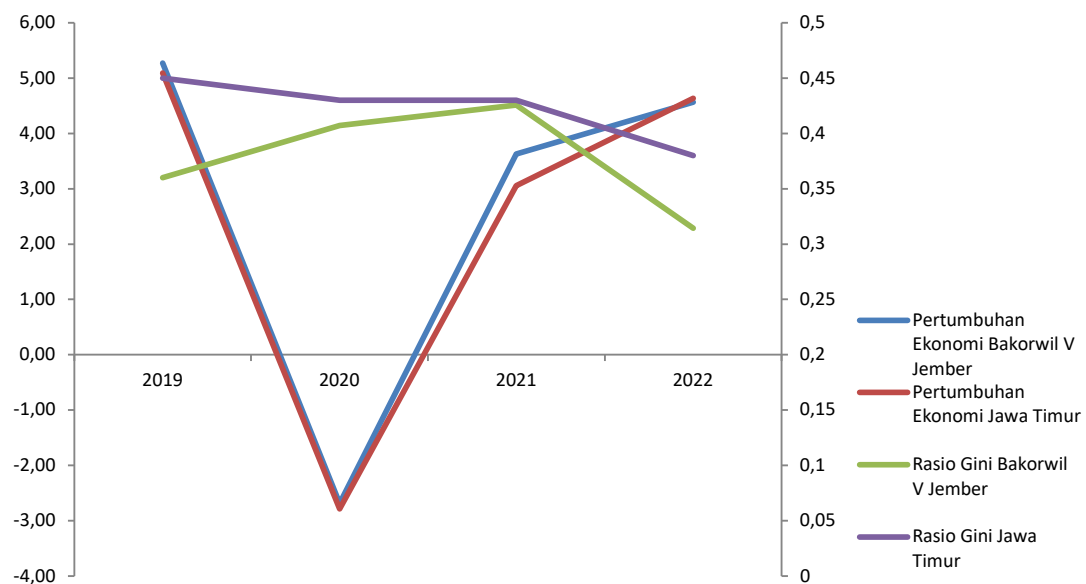
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2025)

Gambar 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Gas Rumah Kaca (GRK) Wilayah Kerja Bakorwil V Jember Tahun 2019-2022

Kondisi kebijakan fiskal yang perlu diperhatikan adalah ketika pendapatan asli daerah (PAD) bertolak belakang dengan keadaan pembangunan berkelanjutan, dimana kondisi kebijakan fiskal kontraktif. Hal tersebut sejalan dengan kondisi di wilayah kerja Bakorwil V Jember. Pada tahun 2019 kondisi PAD 23,55 triliun Rupiah dengan gas rumah kaca (GRK) yang tinggi 53.272,45 ekuivalen/kg, hal tersebut diakibatkan pada proses pembangunan yang tidak sejalan dengan tujuan proses pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan konsep yang ditawarkan oleh Mahzab Klasik menyatakan bahwa keberlangsungan pembangunan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengabaikan kondisi lingkungan (Suharyono, 2025). Proses pembangunan yang terjadi pada tahun 2020 sampai 2022, dimana kondisi perekonomian dan pemerintahan menghadapi Pandemi Covid-19 menyebabkan fluktuasi GRK. Pada tahun 2020 nilai GRK sebesar 15.918,09 ekuivalen/kg dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 24.488,26 ekuivalen/kg dengan jumlah penerimaan PAD sebesar 22,27 triliun Rupiah. Dampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya resesi di seluruh dunia dan secara regional terutama pada wilayah kerja Bakorwil V Jember.

Dengan pelambatan ekonomi yang disebabkan Pandemi Covid-19 dan tantangan geopolitik dunia menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada posisi terendah sejak terjadinya krisis ekonomi dan moneter tahun 1997/1998. Pada tahun 2019, kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur berada pada 5,09% dan pertumbuhan ekonomi wilayah kerja Bakorwil V Jember berada pada 5,27% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut ditopang oleh komoditas pertanian dan industri sekunder, dimana kenaikan harga yang stabil pada sektor pertanian terutama pada pertanian padi dan jagung yang berdampak pada dorongan pendapatan petani (Issundari, 2021). Perubahan yang signifikan terjadi pada tahun 2020 dimana Pandemi Covid-19 menyebabkan lumpuhnya aktivitas perekonomian. Kondisi tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang sangat berat, dimana posisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur berada pada -2,78% dan di wilayah kerja Bakorwil V Jember berada pada -2,69%. Merosotnya pertumbuhan ekonomi juga diperparah dengan berbagai mutasi yang disebabkan oleh Covid-19 sehingga pada tahun 2021 kondisi pertumbuhan ekonomi masih cukup rendah dibandingkan pada tahun 2019.

Kebijakan stimulus fiskal dan batalan sosial yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi telah memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 (Kholilah & Emila, 2025). Pertumbuhan Provinsi Jawa Timur berada pada 4,63% dan di wilayah kerja Bakorwil V Jember berada pada 4,56% dimana pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh perbaikan kondisi daya beli masyarakat dan pembukaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga perputaran uang di masyarakat kembali stabil dan memberikan *multiplier effect* pada sektor ekonomi lainnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini Tahun 2019-2022 Provinsi Jawa Timur dan Wilayah Kerja Bakorwil V Jember

Disisi lain, kondisi ketimpangan antara masyarakat miskin dan kaya atau rasio gini mengalami fluktuasi yang cukup tinggi, dimana pada tahun 2019 rasio gini Provinsi Jawa Timur berada pada 0,45% dan di wilayah kerja Bakorwil V Jember berada pada 0,36% yang menunjukkan bahwa pada Provinsi Jawa Timur ketimpangannya cukup tinggi dan pemerataan ekonomi yang sangat kurang. Masuknya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan rasio gini semakin tinggi terutama pada wilayah kerja Bakorwil V Jember yang berada pada posisi 0,41% dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 0,43% dengan pelambatan ekonomi dan tingginya persoalan ekonomi sosial yang diakibatkan Pandemi Covid-19. Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan stimulus ekonomi yakni keringan fiskal serta bantuan sosial berupa pemerataan bantuan tetap sasaran menyebabkan rasio gini Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,05% menjadi 0,38% dan di wilayah kerja Bakorwil V Jember mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni 0,11% menjadi 0,31%.

Menurut Leotinus (2025) kondisi ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh New Keynesian pada persoalan kemiskinan bahwa intervensi pemerintah dalam mengontrol kondisi pasar dan masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung tujuan utama yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil serta kondisi sosial ekonomi yang tidak rentan terhadap perubahan geo ekonomi dan politik luar negeri. Oleh karena itu, integrasi antara indikator PDRB, kemiskinan, PAD, dan emisi gas rumah kaca menjadi krusial dalam merumuskan kebijakan fiskal yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan lokal, tetapi juga selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan nasional dan global. Kondisi pembangunan di daerah tanpa memikirkan dampak sosial ekonomi dan makroekonomi yang berkelanjutan, maka proses pembangunan yang berkelanjutan tidak tercapai secara maksimal. Tujuan pembangunan yang berkelanjutan merupakan hasil jangka panjang dari proses kebijakan fiskal yang pruden (Adiyanta, 2020).

Dengan hasil yang mendalam dan representatif, maka proses perumusan kebijakan fiskal sebagai instrumen pemerintah dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan berkelanjutan akan tercapai. Dimana konsep yang ditawarkan oleh *Solow – Swan* bahwa proses pembangunan suatu wlayah harus mengedepankan hasil yang langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai tujuan utama dengan *multiplier effect* pada kondisi makroekonomi dan sosial ekonomi.

METODOLOGI PENELITIAN

Regresi *Panel Least Square* (PLS) univariat adalah sebuah model yang menghubungkan antara sebuah variabel respon Y dengan sekumpulan variabel prediktor X. Menggunakan instrument variabel pendapatan asli daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan gas rumah kaca (GRK) dengan lokasi penelitian berada di wilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Jember (Bakorwil V Jember) yang terdiri dari Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo. Data yang digunakan dari tahun 2018 hingga 2023, dimana rentang waktu tersebut terjadi fenomena geoekonomi, politik dan sosial kesehatan.

Regresi PLS merupakan salah satu metode untuk mengatasi multikolinieritas yang dapat diperoleh melalui regresi sederhana maupun berganda dengan mengambil kesimpulan dari uji signifikansi (Gujarati, 2012). Uji signifikansi bertujuan untuk memilih variabel prediktor pembangun komponen PLS dan menentukan banyaknya komponen PLS yang terbentuk. Tujuan PLS adalah membentuk komponen yang dapat menangkap informasi dari variabel prediktor untuk memprediksi variabel respon. Data panel merupakan kombinasi antara data *cross section* dengan data *time series*. Baltagi (2008) menuliskan persamaan data panel secara teori dan diturunkan lebih spesifik terhadap variabel indikator penelitian sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Sehingga dalam model estimasi panel least square (PLS) sebagai berikut:

$$PAD_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 KM_{it} + \beta_3 GRK_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

PAD	: Pendapatan Asli Daerah	$\beta_1, \beta_2, \beta_3,$: Koefisien regresi variabel bebas
PDRB	: Pertumbuhan Ekonomi	i	: <i>Cross Section</i> / jenis provinsi
KM	: Kemiskinan	t	: <i>Time Series</i> / waktu
GRK	: Gas Rumah Kaca	e	: <i>Error term</i>
β_{0i}	: Konstanta		

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Fixed Effect Model (FEM)

Menggunakan pendekatan analisis *Fixed Effect Model* (FEM) untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan gas rumah kaca terhadap variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah. Berdasarkan nilai ambang *p-value* yang diperbandingkan pada nilai signifikansi sebesar *alpha* 0,05 atau 5%.

Tabel 1. Hasil Analisis Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB)	2.648951	1.523972	1.738188	0.0918
LOG(KM)	-29.45423	10.40986	-2.829455	0.0080
LOG(GRK)	0.733700	0.150835	4.864265	0.0000
C	77.48590	26.67175	2.905167	0.0066
R-squared				0.705887
Adjusted R-squared				0.623167
F-statistic				8.533512
Prob(F-statistic)				0.000002

Sumber: Hasil Analisis (2025)

Dari analisis *Fixed Effect Model* (FEM) ditentukan bahwa persamaan model sebagai berikut:

$$PAD_{it} = 77.48590 + 2.648951PDRB_{it} - 29.45423KM_{it} + 0.733700GRK_{it} + \epsilon_{it} \dots\dots\dots(3)$$

Diskripsi hasil estimasi FEM diinterpretasikan sebagai berikut:

1. α merupakan konstanta yang bernilai 77,48590, dimana nilai pendapatan asli daerah (PAD) pada pembangunan berkelanjutan mengalami kenaikan sebesar 77,48590 satu satuan dan variabel lain dianggap tetap (*Ceteris Paribus*).
2. Koefisien pertumbuhan ekonomi (PDRB) bernilai 2,648951, dimana setiap kenaikan jumlah pertumbuhan ekonomi sebesar satu satuan maka nilai PAD mengalami kenaikan sebesar 2,648951 satu satuan dan variabel lain bersifat *Ceteris Paribus*.
3. Koefisien kemiskinan (KM) bernilai -29.45423, dimana setiap kenaikan yang persentase kemiskinan sebesar satu satuan maka nilai PAD mengalami penurunan sebesar 29.45423 satu satuan dan variabel lain bersifat *Ceteris Paribus*.
4. Koefisien gas rumah kaca (GRK) bernilai 0.733700, dimana setiap kenaikan jumlah gas rumah kaca sebesar satu satuan maka nilai PAD mengalami kenaikan sebesar 0.733700 satu satuan dan variabel lain bersifat *Ceteris Paribus*.

Nilai probabilitas atau kepercayaan berdasarkan hasil estimasi pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi yang berupa PDRB tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dimana nilai signifikansi lebih besar dari *alpha* 0,05 yakni 0,0918. Sedangkan pada variabel sosial ekonomi dan lingkungan berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan nilai masing-masing 0,0000 untuk gas rumah kaca (GRK) dan 0,0800 untuk variabel kemiskinan.

B. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam proses pembangunan daerah yang berorientasi keberlanjutan, maka kondisi pembiayaan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) harus dalam kondisi yang baik dan sehat. Kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola fiskal dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan pembangunan berkelanjutan. Dengan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, maka PAD daerah lebih elastis dalam proses pembangunan berkelanjutan (Mutiaro *et.al*, 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja Bakorwil V Jember memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa proses pembangunan yang tidak berorientasi keberlanjutan memberikan dampak terhadap penerimaan PAD di wilayah Bakorwil V Jember semakin rendah. Dimana nilai PDRB mencerminkan proses keberhasilan dari pembangunan berkelanjutan, sehingga kondisi PAD menjadi *multiplier effect* pada tingginya pertumbuhan ekonomi terutama pada kabupaten/kota wilayah kerja Bakorwil V Jember.

Fenomena tersebut sejalan dengan konsep yang ditawarkan oleh *Solow – Swan* dimana dalam proses pembangunan harus mengedepankan pertumbuhan ekonomi secara agregat dengan memasukkan akumulasi modal dan intervensi teknologi serta tingginya kompetensi tenaga kerja (Ozil, 2024). Penelitian Ramadhani (2024) menyatakan bahwa pembangunan daerah tidak sejalan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah (PAD), melainkan memberikan *multiplier effect* pada sektor sosial ekonomi.

C. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pandangan mazhab *New Keynesian* menekankan bawa intervensi pemerintah pada sektor sosial ekonomi akan berdampak pada menurunnya jumlah kemiskinan pada suatu wilayah. Proses intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dengan pembiayaan pembangunan yang mengedepankan padat karya yang berdampak pada bertambahnya pendapatan perkapita (Permata *et.al*, 2024). Kombinasi antara pembiayaan padat karya dengan subsidi pada sektor pendidikan, akan berdampak pada peningkatan kemampuan masyarakat yang berorientasi pada pengurangan jumlah kemiskinan. Pendekatan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan mengentaskan kemiskinan merupakan konsep kebijakan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah (Putra *et.al*, 2025).

Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja Bakorwil V Jember berpengaruh langsung pada kondisi pendapatan asli daerah (PAD). Bahwa pemberian bantuan langsung dan proses pembangunan yang melibatkan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat, akan mengurangi beban sosial ekonomi baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.

Kondisi sosial ekonomi yang tidak pasti, memberikan dampak pada meningkatnya kemiskinan. Selain dengan intervensi pemerintah dengan pembangunan padat karya dan dan pemberian subsidi pendidikan, penyertaan modal pada sektor produksi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) juga memberikan dampak pada penurunan jumlah kemiskinan (Sari *et.al*, 2024). Dengan penyerapan tenaga kerja yang diakibatkan oleh penyertaan modal pada sektor produksi dan UMKM, maka kondisi jumlah kemiskinan semakin berkurang. Penelitian Issundari & Yani (2021) menyatakan bahwa kondisi pengurangan kemiskinan berpengaruh pada kondisi fiskal dan arah pembangunan berkelanjutan. Kualitas pembangunan yang berorientasi pada pada karya dan penyerapan tenaga kerja yang semakin tinggi maka kondisi kemiskinan semakin berkurang.

D. Pengaruh Gas Rumah Kaca (GRK) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi gas rumah kaca (GRK) dari proses pembangunan memberikan pengaruh langsung terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dengan kondisi PAD sebagai instrumen fiskal daerah yang semakin tinggi, maka proses pembangunan harus lebih mengedepankan dampak GRK baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Pemberian kebijakan fiskal yang fleksibel tanpa mengedepankan dampak GRK pada lingkungan dan masyarakat, merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas pembangunan berkelanjutan.

Dampak pembangunan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah tidak memperhitungkan kondisi lingkungan. Dimana lingkungan tidak hanya berorientasi pada limbah sampah, melainkan efek gas rumah kaca (GRK) yang berdampak pada pemanasan global (Wicaksono, 2023). Kondisi lingkungan dan dampaknya pada stabilitas perekonomian yang tidak terhitung dengan rinci, merupakan *bubble* yang nantinya berdampak pada keberlangsungan kehidupan manusia. Kepedulian pemerintah pada dampak pembangunan harus sejalan dengan proses pembangunan yang berkelanjutan tanpa mengurangi komposisi pembangunan (Yuliani, 2024).

Pengaruh gas rumah kaca (GRK) yang saat ini ditimbulkan memberikan dampak yang tidak langsung pada proses pendapatan asli daerah (PAD). Dimana kondisi GRK yang semakin tinggi akan sejalan dengan tingginya pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima pada suatu wilayah daerah (Zulaikah, 2024). Kondisi tersebut sejalan dengan konsep Teori Neo Klasik yang menyatakan bahwa dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan maka diperlukan intervensi teknologi dan modal produksi. Berdasarkan konsep tersebut, kondisi GRK menjadi tumpuan penting dalam proses pembangunan berkelanjutan (Arkaan & Yulianto, 2025).

KESIMPULAN

Variabel kemiskinan dan gas rumah kaca (GRK) memberikan dampak terhadap peningkatan dan pengurangan pendapatan asli daerah di kabupaten/kota wilayah kerja Bakorwil V Jember. Disisi lain, kondisi pertumbuhan ekonomi bertolak belakang dengan kondisi PAD bahwa tidak ada pengaruh yang diberikan secara

signifikan. Hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga penerimaan PAD dan pembangunan berkelanjutan adalah dengan melaksanakan pembangunan yang berorientasi padat karya sehingga perputaran uang di masyarakat menjadi lebih banyak. Pada proses pembangunan, penyerapan tenaga kerja perlu dioptimalkan lebih tinggi sehingga *multiplier effect* pada tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Kebijakan pemerintah terutama pada pembangunan berkelanjutan harus perlu ditingkatkan dengan proses transfer teknologi dan modal capital yang tinggi, sehingga stabilitas ekonomi terjaga dan keberlangsung kehidupan lebih baik.

REFERENSI

1. Abraham, Pangestoeti, W., Ayu Puspita Sari, T., & Khoirunnisa, A. (2024). Analisis Kebijakan Fiskal: Dampak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tanjungpinang. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 151–155.
2. Adiyanta, F. S. (2020). Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 162–181. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.162-181>
3. Arkaan, A. B., & Yulianto, H. (2025). Tinjauan kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi review of fiscal policy and economic growth 1,2,3,4. *Jurnal Intelek Cendikia*, 2, 4196–4207.
4. Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2023. Surabaya.
5. Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. Surabaya.
6. Baltagi, B. (2008). *Econometric Analysis of Panel Data*. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.
7. Gujarati, Damodar N. (2012). “Dasar-dasar ekonometrika”. Terjemahan buku ke 2. Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta.
8. Hafizd, J. Z., Yadi Januari, & Sofian Al-Hakim. (2024). Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 146–167. <https://doi.org/10.69768/ji.v3i2.58>
9. Handini, N., Darwina, M., Yudistira, & Candra, M. (2025). Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Ketimpangan Ekonomi di Negara Indonesia. *Hikamatzu | Journal of Multidisciplinary*, 2(1), 176–183.
10. Hidayat, D., Kinanti, I. (2022). Insentif Pajak Lingkungan: Suatu Instrumen Kebijakan Fiskal Guna Mewujudkan Industri Ramah Lingkungan. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 2(1), 51–66.
11. Issundari, S., & Yani, Y. M. (2021). Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Kerja Sama Internasional Daerah. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 13(1), 103–122. <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4366>
12. Kholilah, R., & Emila, A. (2025). Manajemen Fiskal dan Kajiannya dalam Upaya Mewujudkan Stabilitas Ekonomi: Tinjauan atas Kebijakan, Strategi, dan Dampaknya terhadap Perekonomian Nasional. *Finotec : Journal of Islamic Finance and Economics* 2, 423–431.
13. Leontinus, G. (2022). Program Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Dalam Hal Masalah Perubahan Iklim Di Indonesia. *Jurnal Samudra Geografi*, 5(1), 43–52. <https://doi.org/10.33059/jsg.v5i1.4652>
14. Mutiara, A., Siregar, I. S., Chairani, M., Nur, M. L., Afriyanti, Y., & Nadilla, T. (2024). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mendukung Stabilitas Ekonomi Makro. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(7), 212–226. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1868>
15. Ozil, P. K. (2024). Economic policy for sustainable development: role of monetary policy, fiscal policy and regulatory policy. *Circular Economy and Sustainability*, 121523, 1–32.
16. Permata, D. A., Margiyana, H. M., Bani, L. S., & Noviarita, H. (2024). Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 8592–8602.
17. Putra, E., Nusamuda Pratama, I., Dinar Sulistiya Ningrum, S., Lestari, N., Ari Azhari, M., Aslan, M., Putra Sarkila, A., & Kartika, P. (2025). Implementasi Kebijakan Fiskal Hijau Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara: Peluang Dan Tantangan Untuk Transisi Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia. *Nusantara Hasana Journal*, 4(9), Page 39-51.
18. Ramadhani, D. R., Fadila, W. N., & Safira, N. (2024). Analisis Pengaruh Belanja Daerah dan PDRB terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), 20–37. <https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.511>

19. Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, F. P., & Fadilla, A. (2024). Kebijakan Fiskal dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(4), 1–10. <https://doi.org/10.47134/jeae.v1i4.231>
20. Suharyono. (2025). Penerapan Green Budgeting: Strategi Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Volume, 2(May), 195–203. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16478638>
21. Wicaksono, A., Keuangan, P., & Stan, N. (2023). Kontribusi Aktif Pemerintah Pada Penanganan Isu Gas Rumah Kaca dan Perubahan Iklim Global. *Jurnal Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 45–58.
22. Yuliani, N. M., Paturochman, I. R., Mubarok, A. T., & Muzaki, R. A. (2024). Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika (JBBE)*, 18(1), 296–300.
23. Zulaikah. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro. *Journal of Mandalika Literature*, 6(1), 2745–5963.